

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DENGAN MEMANFAATKAN ASET LOKAL ;**
Studi Deskriptif di Desa Mlatirejo & Desa Sendangmulyo yang berbatasan dengan Hutan Jati¹
(SOCIAL DEVELOPMENT BY OPTIMALIZING LOCAL ASSET;
Description study ini Maltirejo village and Sendangmulyo village that closed to forest areas)

Muhtar²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan aset lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pendekatan penelitian ini kualitatif (action research). Hasil penelitian menunjukkan: (masyarakat) kelompok yang tergabung pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)-Mlatirejo telah dapat mengembangkan pengolahan sumberdaya lokal: pembuatan criping pisang, ubi jalar, dan talas melalui teknologi sederhana. Yang belum dilakukan adalah pembuatan kompos dari kotoran ternak sapi/kambing. Kelompok tersebut juga telah dapat melakukan aksi sosial: santunan anak yatim/piatu, pertemuan kelompok per-selapanan (35 hari) dan pencatatan atas kegiatan yang dilakukan/pengadministrasian, serta sekaligus penghimpunan dana dari oleh dan untuk anggota (masyarakat). Sementara itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)-Sendangmulyo juga telah dapat melakukan pembuatan criping gadung dan pisang. Seperti pada Gapoktan, pembuatan kompos juga belum dapat dilakukan yang sebenarnya telah mendapat pesanan dari calon pengguna sekitar dua ton-an (menunggu musim hujan). Kegiatan sosial yang dilakukan antara lain mengantar berobat seorang warga yang stress (ke Rumah Sakit Jiwa Solo), pertemuan kelompok sebulan sekali, dan melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Kata kunci: aset lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Abstract

This study aims to develop local assets in terms of empowering communities around the forest. This, qualitative research approach (action research). The results showed: Farmers' Groups combined-Mlatirejo been able to develop the processing of local resources: the creation of snack banana, sweet potato and taro through simple technology. That was done is not making compost from the manure of cattle/goat. The group has also been able to do social action: compensation for orphans, group meetings once a 35 days, and recording the activities/administration, and simultaneously raising funds by and for members of the community. Meanwhile, Rural Community Agencies-Sendangmulyo been able to creation snack from tubers (gadung) and bananas. As in Gapoktan, composting can be done that has not actually been received orders from potential users about two tons (waiting for the rainy season). Social activities are carried out such a citizen who drove stress treatment (to Mental Hospital Solo), a group meeting once a month, and keep records of activities/administration.

Keywords: local assets, the empowerment of forest communities.

PENDAHULUAN

Komunitas ditingkat lokal dalam perjalanan waktu telah mengembangkan suatu aset/modal yang menjadi sumberdaya bagi komunitas

tersebut, yang sekurangnya terdapat enam aset, yaitu: modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia, dan modal sosial. Aset-aset tersebut dapat (masih)

¹ Diangkat dari penelitian "Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Action Research di Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo, Rembang, Jawa Tengah" yang dibiayai oleh Kementerian Riset & Teknologi (2011). Tim Peneliti: Muhtar (Ketua), Abu Hanifah, Sutaat, Teti Ati Padi, & Sugiyanto (Anggota). Penulis telah meminta izin kepada mitra-mitra tersebut (secara lisan), dengan demikian segala konsekuensi dari dimuatnya naskah ini pada "JURNAL SOSIOKONSEPSIA" menjadi hak penulis.

² Peneliti Madya Puslitbang Kessos, Kementerian Sosial RI. e-mail:muchngano17@gmail.com

merupakan potensi yang perlu dikembangkan, maupun menjadi kelemahan pada komunitas/masyarakat tersebut (Adi, 2007: 35).

Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang modal lingkungan, degradasi lingkungan menjadi isu aktual, setiap tahun Indonesia kehilangan dua juta hektar hutan, atau setiap hari kehilangan 5.400 hektar. Kondisi ini akan menjadi kian parah dengan diberlakukannya sistem desentralisasi pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah (Pemda), karena sebagian Pemda menganggap bahwa hutan adalah sebagai potensi ekonomi (Media Indonesia, 19 Mei 2005).

Menurut MS. Ka'ban, jumlah warga yang tinggal disekitar hutan sekitar 11 hingga 12 juta jiwa. Mereka ini pada umumnya hidup dalam kemiskinan, yang karena miskin itu, mereka menganggap para cukong (pencuri kayu) yang sebenarnya sangat merugikan negara, dianggapnya sebagai "**Robinhood**" (dewa penolong). Para cukong menyediakan berbagai keperluan hidup sehari-hari warga miskin disekitar hutan tersebut (Kompas, 19 Mei 2005).

Kementerian Sosial dalam Rencana Strategisnya (2010-2014) menegaskan, visi pembangunan kesejahteraan sosial adalah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat (secara keseluruhan). Dalam konteks demikian, masyarakat di sekitar hutan yang umumnya kategori miskin, perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh.

Hasil penelitian Muchtar dkk. (2010) di Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo, Rembang, Jawa Tengah sebagai desa yang berbatasan langsung dengan hutan jati menunjukkan, meskipun dari sisi ketersediaan fasilitas (jalan desa, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan) relatif memadai karena

ada akselerasi pembangunan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun sebelumnya oleh pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, dari sisi kehidupan warga di kedua desa tersebut, masih memerlukan perhatian. Dari hasil penelitian tersebut juga diperoleh informasi, pada tahun 1998/1999-an, hutan jati yang berbatasan langsung dengan ke dua desa tersebut habis terjarah (warga), meskipun para penjarah tersebut banyak dari luar ke dua desa tersebut.

Mencermati hal itu, peningkatan taraf kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar hutan, dalam konteks ini warga Desa Mlatirejo & Desa Sendangmulyo yang berbatasan langsung dengan hutan jati perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pelbagai pihak baik pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kementerian Sosial, dimungkinkan terlibat aktif dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan warga masyarakat di sekitar hutan jati tersebut yakni Desa Mlatirejo dan Desa Sendangmulyo melalui program-program pemberdayaannya.

Berdasarkan pemikiran seperti dikemukakan, pertanyaan penelitian ini adalah: (a) bagaimana kondisi masyarakat Desa Mlatirejo dan Sendangmulyo yang berbatasan langsung dengan hutan jati?; (b) bagaimana proses perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan aset lokal ?.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah: (a) mendeskripsikan kondisi masyarakat Desa Mlatirejo dan Desa Sendangmulyo; (b) mendeskripsikan proses perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan aset lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi direktorat terkait Kementerian Sosial dan umumnya Pemerintah Daerah

Kabupaten Rembang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka memberdayakan masyarakat (miskin) sekitar hutan dengan mengembangkan potensi lokal yang tersedia. Secara akademik dapat menambah informasi bagi para pemerhati dan akademisi dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan khususnya di Desa Mlatirejo dan Sendangmulyo.

Pendekatan penelitian ini kualitatif, seperti yang dinyatakan Locke, Spiduso dan Silverman (1987) dalam Creswell (2002), penelitian kualitatif bertujuan memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi tertentu. Selanjutnya, jenis penelitian ini terapan, dimana masyarakat dilibatkan dan menjadi pelaku dalam semua tahapan penelitian: *look, think, act* (Stringer, 1999). Diharapkan terjadi pembelajaran secara langsung, sehingga penanganan permasalahan (kesejahteraan sosial), peningkatan peran lembaga lokal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari sisi finansial, dan pemanfaatan potensi lokal dapat dilakukan dengan cara mereka sendiri.

Penelitian tindakan ini dilakukan bulan Juni s/d Oktober 2011. Tahap *look* memanfaatkan/*review* hasil penelitian 2010, kemudian diperbarui bulan Juni 2011, yang dilanjutkan *think* pada bulan Juni 2011 juga. *Act* dilakukan dalam kurun waktu Juli s/d Oktober 2011. Tahap *Look 2* dan *think 2* dilakukan bersamaan dilakukan evaluasi akhir yakni bulan Oktober 2011. Lokasi penelitian: Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo Rembang Jawa Tengah. Ke dua desa tersebut berbatasan langsung dengan hutan jati.

Informan penelitian ini adalah para pemuka masyarakat (formal, informal): tokoh formal/perangkat desa, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda sebanyak 15 orang perdesa. Jenis sampling pada penelitian ini adalah

non-probabilita. Berdasarkan pendapat Alston and Bowles (2003) yang menyatakan bahwa: *non probability sampling* itu bersifat “*each population unit does not have an equal chance of selection, no claim to be representative, does not necessarily allow the researcher to generalis result*.”

Untuk mendapatkan data-data primer dan sekunder dilakukan teknik berikut: (a) studi literatur dan dokumentasi, untuk mendapatkan data sekunder; (b) in-depth interview (tidak terstruktur, tidak rigid tetapi bersifat eksplorasi). dilakukan secara individu dan kelompok. Pertanyaan yang dilontarkan untuk menggali informasi dan pengalaman partisipan (kondisi sumberdaya lokal yang tersedia, permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul, peranan lembaga lokal, dan partisipasi masyarakat); (c) group interviews, untuk menggali informasi dan menganalisis data yang telah di peroleh dengan cara berdiskusi dan saling bertukar pendapat dalam kelompok; (d) partisipan observation yaitu mengamati aktivitas, kejadian dan lokasi yang berhubungan dengan kondisi masyarakat, yakni sumberdaya yang tersedia, permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, dan kondisi partisipasi sosial masyarakat.

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan tahapan: reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sendangmulyo

Secara geografis, Desa Sendangmulyo yang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bulu ini berbatasan langsung dengan hutan jati (Perhutani) pada bagian selatan, Desa Pondokrejo pada bagian utara, Desa Warugunung dan Desa Pinggan pada bagian timur, serta Desa Mlatirejo pada bagian

barat. Luas wilayah Desa Sendangmulyo 884,24 hektar, dimana 254,14 hektar berupa tanah sawah dan 630,10 hektar berupa tanah kering. Dalam kondisi demikian, Desa Sendangmulyo termasuk terluas kedua di wilayah Kecamatan Bulu setelah Desa Pasedan. Jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Bulu 17 Km (Bulu dalam Angka, 2008), sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Rembang 24 Km (Podes Sendangmulyo, 2008). Dari dan ke desa tersebut telah tersedia angkutan umum (Angdes).

Penduduk Desa Sendangmulyo berjumlah 1.470 KK/4.412 jiwa (laki-laki: 2.198 jiwa, perempuan: 2.214 jiwa). Mereka tersebar di 25 rukun tetangga (RT), yaitu: 8 RT di Rukun warga (RW) I/Dukuh Krajan, 6 RT di RW II/Dukuh Kidulan, 6 RT di RW III/Dukuh Galgrijo, dan 6 RT di RW IV/Dukuh Punggul (Podes Sendangmulyo, 2008).

Dari sisi etnis, warga Desa Sendangmulyo dapat dikatakan homogen, yakni etnis Jawa. Dari sisi religi/kepercayaan/agama, mayoritas memeluk agama Islam, dan hanya terdapat dua orang penganut Kristiani, dua orang menganut Budha, dan empat orang penganut aliran kepercayaan. Sistem agraris merupakan mayoritas mata pencarian warga desa ini. Hubungan kekerabatan pada warga Desa Sendangmulyo ini meskipun dapat dikatakan telah mengalami pergeseran sebagai akibat atau pengaruh karena pengaruh teknologi-informasi khususnya, namun sistem kekerabatan pada warga desa ini dapat harmonis. Hal itu terlihat, masih terpeliharanya pranata sosial berupa nilai-nilai positif yang tetap lestari di masyarakat hingga saat ini, yakni: sambatan ketika mengerjakan lahan pertanian mengerjakan rumah. Nilai-nilai yang sifatnya spiritual (baca: kepercayaan) juga masih terpelihara secara baik oleh warga di Desa Sendangmulyo ini, seperti: selamatan/sedekahan/syukuran jika akan menanam dan akan memanen padi, jika

sapi mereka beranak, jika mereka membeli motor, dan lain sebagainya.

Organisasi sosial-kemasyarakatan di desa ini antara lain: PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, dan Organisasi Muslimat/Fatayat. Warga desa ini secara turun temurun masih meyakini apa yang mereka sebut sebagai “Resik Deso” (Bersih Desa) yang dilakukan secara rutin pada bulan Madilakir (Jumadil Akhir) dengan mengadakan kesenian “Tayub”, jika tradisi itu ditinggalkan, akan terjadi marabahaya.

Kondisi Umum Desa Mlatirejo

Desa Mlatirejo juga merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Luasnya 383,10 Ha, dimana 85,55 hektar berupa tanah sawah dan 297,55 hektar berupa tanah kering (perkebunan, dan hutan milik perhutani). Hasil utama pertanian penduduk adalah: padi, kedelai, jagung, tebu, dan hasil kebun berupa pisang dan buah-buahan, terutama mangga.

Batas-batas Desa Mlatirejo: pada bagian selatan berbatasan langsung dengan hutan jati, pada bagian utara berbatasan dengan Desa Pelemsari, pada bagian timur berbatasan dengan Desa Sendangmulyo, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Loh Gede. Secara demografis, Desa Mlatirejo berpenduduk 314 KK/939 jiwa (laki-laki: 460 jiwa, perempuan: 479 jiwa). Mereka tersebar di sembilan rukun tetangga (RT), yakni empat RT di Rukun Warga (RW) I yakni: Dukuh Malat, dan lima RT di RW II yakni Dukuh Balong (Podes Mlatirejo, 2008).

Seperti Desa Sendangmulyo, warga Desa Mlatirejo juga homogen dari sisi etnis, yakni Jawa. Dari sisi religi/kepercayaan/agama, dapat dikatakan, seluruh warga memeluk Islam. Sarana-prasarana ibadah yang tersedia: sebuah Masjid dan empat buah Musholla. Sistem agraris

juga merupakan mayoritas mata pencarian warga desa ini. Hubungan kekerabatan pada warga desa ini dapat dikatakan harmonis meskipun telah mengalami pergeseran sebagai pengaruh teknologi-informasi khususnya. Hal itu terlihat, masih terpeliharanya pranata sosial berupa nilai-nilai positif yang tetap lestari di masyarakat hingga saat ini, yakni: *sambatan* ketika mengerjakan lahan pertanian mengerjakan rumah. Nilai-nilai yang sifatnya spiritual (baca: kepercayaan) juga masih terpelihara secara baik oleh warga di Desa Mlatirejo ini, seperti: selamatan/sedekahan/syukuran jika akan menanam dan akan memanen padi, jika sapi mereka beranak, jika mereka membeli motor, dan lain sebagainya. Warga desa ini secara turun temurun masih meyakini apa yang mereka sebut sebagai “*Resik Deso*” (Bersih Desa) yang dilakukan secara rutin pada bulan Rejeb (Rajab) dengan mengadakan kesenian Ketoprak. Jika tradisi itu ditinggalkan, akan terjadi marabahaya. Di Desa Mlatirejo juga terdapat lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan, seperti: PKK dan Kelompok Tani.

Proses Perencanaan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Aset Lokal

Tahap persiapan

Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah kontak awal dengan pemuka masyarakat (formal, informal) termasuk dengan pengurus Gapoktan di Mlatirejo dan LMDH di Sendangmulyo. Anggota kelompok ini dapat dikatakan mewakili masyarakat.

Tahap identifikasi masalah (*Assessment*)

Melalui diskusi kelompok diketahui banyak hal, sekurangnya pendapat tentang permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga, dan aset-aset yang tersedia. Dalam

kaitan dengan salah satu pemenuhan kebutuhan dasar warga di kedua desa lokasi penelitian, dari hasil identifikasi menunjukkan bahwa sumber air bersih yang digunakan warga adalah air tanah melalui sumur gali dan penyaluran dari air sungai dekat hutan ke rumah-rumah warga. Penyaluran air tersebut didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kondisi ini terjadi di Desa Mlatirejo, sedangkan di Desa Sendangmulyo, warga sepenuhnya masih mengandalkan air tanah melalui sumur gali dan air sendang (sumber mata air) di desa tersebut.

Menurut Kades Mlatirejo: “*warga di sini sebagian masih memanfaatkan sumur gali yang sudah ada dari dulu, sebagian lain memanfaatkan air yang telah disalurkan ke desa melalui dana PNPM, dan ada juga untuk keperluan minum, warga memperolehnya dengan cara membeli*” (Kades Mlatirejo, Juni 2011).

Pada identifikasi ini juga diperoleh informasi tentang partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan kebersihan lingkungan. Dapat dikatakan, masyarakat kurang kesadaran untuk melakukan kegiatan bersih lingkungan, baik di tingkat desa, dan lingkungan RT. Diperoleh informasi, tidak ada lagi kegiatan kebersihan lingkungan. Hal ini dituturkan oleh perangkat desa sebagai berikut: “*Iya dulu pernah ada kebersihan lingkungan, sekali dua kali warga mau ikut, tapi setelah itu aparatnya aja yang gotong royong, masyarakat gak ada yang ikut, lama-lama ya gak ada*” (Sekdes Sendangmulyo, Juni 2011). Hal itu disebabkan antara lain oleh adanya Program Bantuan Desa (Bandes) sekarang Alokasi Dana Desa/ADD.

Namun demikian, kegiatan “Gotong Royong” dan “Sambatan” jika ada warga yang hajatan, seperti: pernikahan, sunatan, menggarap lahan pertanian, memperbaiki rumah, kegiatan tersebut masih terpelihara

dengan baik. Demikian juga jika ada warga yang terkena musibah, seperti kematian dan musibah lainnya, kekeluargaan dan saling tolong antar warga masih sangat tinggi.

Disela-sela diskusi yang dinamis itu, *community worker* secara hati-hati memberikan informasi tentang pentingnya pemanfaatan sumberdaya lokal yang tersedia, peranan lembaga lokal, pentingnya menghimpun dana dari warga dan untuk warga (simpan pinjam) guna mengatasi permasalahan yang ada. Dengan penyampaian informasi secara santai, kelihatan, peserta berpikir atas kondisi yang ada dan dialaminya.

Berikut, mendiskusikan aset yang dimiliki baik di Desa Mlatirejo maupun Desa Sendangmulyo. Menurut mereka, aset-aset yang ada antara lain modal sosial, seperti: nilai dan norma yang mengikat warga masyarakat dan mengatur pola perilaku warga, juga adanya kepercayaan dan jaringan yang kuat antar warga masyarakat. Dicontohkan, pada kegiatan sambatan menanam dan memanen padi, selamatan ketika mendapat nikmat seperti membeli sapi, dan atau sapinya beranak, membeli motor, dan lain sebagainya. Nilai kebersamaan masih dijunjung kuat, dan ada kepercayaan antara satu warga dengan warga yang lainnya untuk saling bergantian melakukan gotong royong bertanam, kemudian adanya jaringan antar warga dalam melaksanakan kegiatan sambatan ini. Seperti yang diungkapkan tokoh pemuda yang sekaligus juga Perangkat Desa Sendangmulyo berikut:

Pak di sini masyarakat masih sangat kuat tradisi sambatan, karena, itu merupakan sesuatu yang sangat membantu. Kalau musim tanam, siapa yang ladang/sawahnya sudah siap, maka warga akan bersama-sama menanam padi, jagung, dan lainnya tanpa disuruh, juga sambatan membuat

rumah, tanpa disuruh... (Srn, Juni 2011).

Tentang modal fisik yang dimiliki dan atau sudah ada di Desa Mlatirejo antara lain: jalan yang sudah diaspal yang menghubungkan ke tempat lain termasuk kecamatan dan kabupaten, sehingga transportasi menjadi lancar, adanya gedung Sekolah Dasar yang memadai, Kantor Desa dan tempat pertemuan warga yang representatif, adanya tempat ibadah (masjid), adanya gedung PAUD, Madrasah Diniyah (Madin), adanya penyaluran air dari sungai dekat hutan ke desa dan tempat penampungannya, adanya jaringan listrik dan lainnya. Modal fisik ini sangat bermanfaat guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota kelompok: *"Jalan sudah aspal baik ke desa lain ataupun ke kecamatan bahkan ke kabupaten. Bidan desa juga sudah ada, pasar desa dan lainnya.... (Ysm, Juni 2011).*

Selain itu, modal lingkungan, menurut aparat desa:

Sebenarnya modal itu masih banyak di desa ini, hutan jati, sawah, ladang, kebun, tetapi ada juga warga desa ini yang tidak mempunyai lahan pertanian, mereka ini umumnya tergabung sebagai anggota LMDH dan memanfaatkan hutan jati. Jenis tanamannya ya jagung, singkong, pisang..." (Gdl, Juni 2011).

Untuk modal finansial, kondisinya, masih banyak keluarga tidak mampu/miskin, dari 1.470 KK di Desa Sendangmulyo, 50% lebih dapat dikategorikan keluarga kurang mampu. Dalam kondisi kekurangan tersebut, *tidak sedikit diantara warga yang memanfaatkan hasil hutan, seperti gadung, yang kalau tidak pandai mengolahnya, dapat membuat mabuk yang makan (Jkm, Juni 2011).* Kondisi serupa di Desa Mlatirejo yang berpenduduk 314 KK, dimana lebih 50% warganya juga dalam

kategori kurang mampu. Dalam kaitan modal manusia, dapat dikemukakan bahwa tingkat pendidikan warga di kedua desa tersebut rata-rata rendah (tamat atau bahkan tidak tamat SD/SMP), sedikit yang tamat SLTA/ sederajat.

Modal lainnya, modal spiritual, warga di dua desa ini dapat dikatakan 100% menganut agama Islam. Modal spiritual ini penting sebagai modal dasar memotivasi berbuat baik (amal kebajikan) dan dorongan untuk membantu sesama, yang dapat memberikan makna yang lebih baik terhadap kehidupan masyarakat.

Selain itu juga di Desa Mlatirejo dan Desa Sendangmulyo terdapat beberapa lembaga bentukan baik bentukan pemerintah maupun bentukan masyarakat, seperti: Kelompok Badan Pemberdayaan Desa, Posyandu, Kelompok Pengajian Yasinan, Kelompok Muslimat, Kelompok Arisan, dan Kelompok Tani. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi media melaksanakan kegiatan.

Wawancara secara kelompok menghasilkan informasi-informasi tentang kondisi yang ada di Desa Mlatirejo dan Sendangmulyo. Pada awalnya para informan beranggapan bahwa yang terjadi bukan suatu masalah, karena semuanya dapat berjalan seperti biasanya. Namun setelah berkumpul dan berdiskusi tentang permasalahan kesejahteraan sosial, peranan lembaga lokal, pentingnya partisipasi, pentingnya pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pentingnya usaha simpan pinjam, mereka berfikir dan menjadikan kondisi yang ada sebagai kondisi yang perlu diperbaiki.

Melalui informasi yang diberikan, mereka mulai merasakan pentingnya memperbaiki kondisi kehidupan warga desa. Dari hasil pengamatan, kelompok diskusi dapat membuat gambaran yang sedang terjadi di Desa Mlatirejo dan Sendangmulyo khususnya terkait

permasalahan kesejahteraan sosial yang ada dan penanganannya, perlunya pemanfaatan sumberdaya lokal yang tersedia, peranan lembaga lokal, dan pentingnya penghimpunan dari oleh dan untuk warga melalui koperasi meskipun secara informal. Dengan berdiskusi yang dinamis kelompok-kelompok dapat mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan dihadapi. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah kondisi sosial ekonomi warga yang relatif pas-pasan, kurangnya pemanfaatan sumberdaya lokal yang tersedia, kurang berperannya lembaga lokal yang ada, dan masalah lainnya yang perlu diperbaiki.

Kelompok diskusi menyepakati faktor-faktor penyebab dari kondisi kehidupan warga sebagai berikut: (1) Tingkat pendidikan warga yang relatif rendah. Menurut mereka, banyaknya masyarakat yang (hanya) berpendidikan SD bahkan tidak sekolah, membuat cara berpikir mereka tidak sampai pada bagaimana kehidupan dengan kondisi seperti ini harus diubah; (2) Kondisi sosial ekonomi warga yang pas-pasan (kekurangan) menyebabkan kurangnya partisipasi mereka menjaga lingkungan (hutan) dan gotong royong kebersihan lingkungan; (3) Adanya kecemburuan warga, karena yang mendapat bantuan hanya yang itu-itu (tertentu) saja. Salah satu dampak negatif pemilihan kepala desa khususnya pihak yang tidak terpilih. Jika dihimbau untuk gotong royong kebersihan lingkungan, muncul pendapat: “*yang gotong royong ya yang mendapat bantuan lah*”.

Hasil asesmen tersebut diringkas dan dapat dicermati pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Ringkasan Hasil Asesmen:

HASIL	URAIAN
Kondisi kehidupan warga	Mendapatkan data, jumlah KK yang ada di Desa Mlatirejo 314 KK/939 jiwa (laki-laki: 460 jiwa, perempuan: 479 jiwa), lebih 50 dalam kriteria miskin. Sumber air bersih dari air tanah/sumur gali, dan air yang disalurkan dari sungai dekat hutan jati ke desa melalui PNPB. Sementara itu data KK di Desa Sendangmulyo berjumlah: 1.470 KK/4.412 jiwa (laki-laki: 2.198 jiwa, perempuan: 2.214 jiwa). Juga lebih 50% termasuk kategori miskin. Sumber air bersih mengandalkan air tanah/sumur gali.
Kondisi Sumberdaya/ aset desa	Sumberdaya desa: modal sosial, modal fisik, modal spiritual, modal manusia, modal finansial. Adanya kelompok-kelompok yang terbentuk di masyarakat seperti: Posyandu, Arisan, Pengajian Yasinan, Muslimat, Kelompok Tani.
Kondisi partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat masih kurang dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti: jika ada gotong royong kebersihan lingkungan, sangat sedikit yang ikut bergotong royong.
Identifikasi masalah	Permasalahan yang dihadapi: a. Belum tertanganinya penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan baik; b. Belum Maksimalnya peran lembaga lokal; c. Belum terkelolanya sumberdaya lokal dengan baik; d. Masih banyaknya warga kategori miskin.

Upaya mengembangkan proses perencanaan dan partisipasi masyarakat guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.

Pada tahap ini dikaji/dianalisis perilaku hidup masyarakat dalam hal pemanfaatan sumberdaya lokal, peran lembaga lokal, pentingnya penghimpunan dana dari oleh dan untuk masyarakat, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam melakukan analisis, kelompok diskusi melihat penyebab masalah, menganalisis akibat yang terjadi, menganalisis kemungkinan diadakannya kegiatan untuk memecahkan masalah, serta menganalisis sumberdaya yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Menurut *community worker*, pemanfaatan sumberdaya lokal, peran lembaga lokal, perlunya menghimpun dana dari oleh dan untuk masyarakat, dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor manusia dan sosialnya serta faktor non-manusia.

Berdasarkan pendapat Adi (2007: 129), dari faktor manusia dan sosial dapat diuraikan hal-hal berikut: *Pertama*, faktor predisposisi

(*predisposing factors*) yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku, yang memberikan rasional atau motivasi untuk bertindak. Faktor ini mencakup pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi, norma sosial, dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam kelompok sasaran. Faktor predisposisinya adalah: (1) Pengetahuan yang kurang tentang permasalahan kesejahteraan sosial dan penanganannya; (2) Tidak merasa penting peran lembaga lokal, menghimpun dana, dari, oleh dan untuk masyarakat, dan pemanfaatan sumberdaya lokal; (3) Kecemburuan sosial antara masyarakat yang (sering) mendapat bantuan dan masyarakat yang tidak mendapat bantuan; (4) Kurangnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam menjaga hutan dan gotong royong kebersihan lingkungan.

Kedua, faktor Pendorong (*reinforcing factors*), yaitu faktor setelah perilaku yang memberikan penghargaan lanjut atau insentif untuk perilaku dan memberikan pada keberlanjutannya. Faktor *reinforcing*-nya adalah kurangnya motivasi oleh pemuka masyarakat (formal, informal) dalam mendorong warganya untuk berpartisipasi menjaga hutan dan gotong royong kebersihan lingkungan.

Ketiga, faktor pendukung (*enabling factors*), yaitu faktor yang mendahului perilaku yang mempermudah motivasi untuk direalisasikan. Faktor pendukung ini adalah kurangnya sosialisasi dari dinas/institusi terkait.

Keempat, faktor perilaku manusia (*behavior factors*), yaitu perilaku masyarakat yang menyebabkan masalah terjadi, seperti mencuri kayu di hutan dan kurangnya partisipasi dalam hal gotong royong kebersihan lingkungan.

Dan faktor bukan manusia, terdapat beberapa modal yang mempengaruhi, yaitu modal finansial dimana banyak warga yang kondisi ekonominya kurang mampu sehingga pendapatan kepala keluarga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok. Uraian tersebut digambarkan pada alur assesment kualitas hidup dan aset masyarakat (periksa gambar 1).

Melalui *rembug* kelompok dihasilkan rencana kegiatan yang akan di lakukan, yaitu: memanfaatkan sumberdaya lokal, meningkatkan peran lembaga lokal, meningkatkan usaha simpan pinjam, dan penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kelompok menganalisis sumberdaya yang tersedia di desa dan dapat dimanfaatkan warga untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hasil diskusi di Desa Mlatirejo dan Desa Sendangmulyo, kedua desa tersebut memiliki sumberdaya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, yaitu: modal sosial, modal spiritual, modal fisik, modal lingkungan.

Selanjutnya, pelbagai kelompok (lembaga lokal) di masyarakat dapat menjadi sasaran bagi penyebaran informasi pentingnya kualitas hidup, sehingga informasi semakin cepat diterima masyarakat melalui kegiatan kelompok, seperti: kelompok pengajian (Muslimat), Gapoktan, LMDH. Sebagai contoh, pada saat pengajian, dimana berkumpul banyak orang, pada saat itulah informasi tentang kualitas hidup yang notabene juga anjuran agama dapat disampaikan, sehingga masyarakat juga berpikir untuk mengubah keadaan. Dan jika yang mengajak tokoh agama, warga masyarakat tentu sangat memperhatikan.

Gambar 1, Alur Asesmen & Aset Masyarakat:



Sumber: Adi, 2007: 129 “telah diolah”

Disamping itu juga ada kelompok (lembaga lokal) yang dapat dimanfaatkan dalam pemecahan permasalahan.

Pada tahap *think* ini peserta (kelompok) membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya (*act*). Oleh karena itu pada tahap *act*, kelompok membuat rencana kegiatan pemecahan masalah dan implementasinya. Pada tahap perencanaan kegiatan, sesuai hasil diskusi, kelompok menyepakati rencana kegiatan pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan peran lembaga lokal, penumbuhkembangan usaha simpan pinjam, dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Desa Mlatirejo dan Sendangmulyo. Kegiatan awal yang akan dilakukan adalah peningkatan kompetensi anggota kelompok (lembaga lokal). Pada tahap ini *community worker* membantu kelompok memormulasikan gagasan mereka secara tertulis. Seperti pemberian informasi dan motivasi kepada kelompok tentang pentingnya pemanfaatan sumberdaya lokal, menghimpun dana dari, oleh dan untuk masyarakat, pentingnya peningkatan peran lembaga lokal, serta pentingnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, informasi dilakukan oleh pemuka masyarakat: tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda kepada warga di Desa Mlatirejo dan Desa Sendangmulyo.

Tahap implementasi

Pada tahap implementasi/pelaksanaan ini dilakukan kegiatan-kegiatan:

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta(kelompok) yakni Gapoktan di Desa Mlatirejo dan LMDH di Desa Sendangmulyo, pertama-tama yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka

tentang empat hal berikut: (1) Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan cara mengatasi permasalahan permasalahan kesejahteraan sosial; (2) Manajemen Organisasi Sosial (Lembaga Lokal); (3) Menghimpun dana dari masyarakat dan untuk masyarakat (Koperasi), serta; (4) Pemanfaatan sumberdaya lokal melalui teknologi sederhana (teknologi tepat guna/TTG).

Pemateri pada kegiatan tersebut adalah para instruktur dari instansi terkait di Kabupaten Rembang sesuai bidang tugas dan keahliannya, yakni: Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Manajemen Organisasi Sosial/Lembaga Lokal dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Penghimpunan dana masyarakat (simpan pinjam) dari Dinas Koperasi, pemanfaatan sumberdaya lokal (pisang, ubi, ketela, talas, dan gadung) dari Dinas Pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (BKP & P4K). Disamping itu juga transfer pengetahuan dan praktek pembuatan pupuk kompos dari kotoran binatang ternak dengan instruktur dari Balai Latihan Kerja/BLK Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Disamping pembekalan materi dan praktek, kelompok juga dibekali pengetahuan merancang/merencanakan kegiatan secara tertulis untuk kurun waktu empat bulan yaitu Juli s/d Oktober 2011.

Penyerahan Stimulan.

Di akhir kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut kepada kelompok diberikan dana stimulan Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-kelompok yang diperuntukkan bagi peningkatan pengetahuan baik teori maupun praktek (tingkat lanjutan) dari yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian tindakan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan.

Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, Manajemen Organisasi Sosial (Lembaga Lokal), menghimpun dana dari masyarakat dan untuk masyarakat, serta pemanfaatan sumberdaya lokal melalui teknologi sederhana (teknologi tepat guna/ TTG), lembaga lokal di dua desa tersebut melaksanakan kegiatan (aksi) untuk kurun waktu empat bulan ke depan, yakni mulai Juli hingga Oktober 2011.

Rencana kegiatan yang belum terealisasikan oleh Gapoktan dan LMDH dapat dilaksanakan di waktu yang akan datang, baik dalam bentuk peningkatan kompetensi pengurus kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun peningkatan kualitas

dan variasi pemanfaatan sumberdaya lokal, antara lain: (1) Peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan tentang pelayanan kesejahteraan sosial dan manajemen Organisasi Sosial (Orsos)/lembaga lokal; (2) Peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan tentang fundrising (penggalan dana) dari pelbagai pihak; (3) Peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan tentang marketing (pemasaran) produk Gapoktan dan LMDH; (4) Peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan tentang pengelolaan (pengepakan/pengemasan) produk Gapoktan dan LMDH sebelum dipasarkan; (5) Peningkatan mutu produk Gapoktan dan LMDH sesuai standar (Gizi dan kehalalan); (6) Merealisasikan pembuatan pupuk kompos dari kotoran binatang ternak sebagaimana *order* pasar.

Hasil implementasi tersebut diringkas dan dapat dicermati pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Ringkasan Hasil Implementasi:

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Pemformulasian Rencana Aksi	Perencanaan Kegiatan	Kelompok melalui lembaga lokal akan melaksanakan: - Simpan pinjam (Koperasi) meskipun belum secara formal; - Pelayanan kesejahteraan sosial, - Kegiatan pengolahan sumberdaya lokal (criping, kompos).
Implementasi	Peningkatan kompetensi pengurus/anggota kelompok b. Penyerahan stimulan c. Pelaksanaan kegiatan kelompok melalui lembaga lokal	- Dilakukan di Desa Mlatirejo - Diserharkannya dana stimulan sebesar Rp. 7.500.000, / kelompok - Simpan pinjam (Koperasi) meskipun belum secara formal; - Pelayanan kesejahteraan sosial, Kegiatan pengolahan sumberdaya lokal (criping, kompos).

Tahap evaluasi proses dan akhir/hasil

Di Desa Mlatirejo, Gapoktan merencanakan empat kegiatan: (a) penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, (b) pembenahan dan pengaktifan Gapoktan, (c) penumbuhkembangan kegiatan simpan pinjam, (d) serta pemanfaatan sumberdaya lokal melalui teknologi sederhana/

tepat guna (TTG). Dari evaluasi yang dilaksanakan (Agustus 2011) diketahui, Gapoktan telah melaksanakan kegiatan: penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, pembenahan dan pengaktifan Gapoktan serta pemanfaatan sumberdaya lokal, yaitu: pembuatan criping dari pisang, dari talas, dari

ubi jalar, dan dari gadung. Adapun yang belum terlaksanakan adalah penghimpunan dana dari, oleh dan untuk anggota serta pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak.

Sementara itu, pada LMDH di Desa Sendangmulyo, dari empat rencana kegiatan kelompok, dari evaluasi proses yang dilakukan pada bulan yang sama, yakni bulan Agustus 2011, baru satu rencana yang dapat dilakukan, yaitu pemanfaatan sumberdaya lokal berupa criping dari pisang dan gadung itupun dilakukan secara individu bukan aktivitas kelompok/ lembaga lokal. Diperoleh informasi, ketua LMDH yang *notabene* sekretaris desa cukup sibuk dan tidak cukup mampu menggerakkan kelompok untuk beraktivitas.

Selanjutnya, pada evaluasi akhir yang dilakukan pada bulan Oktober 2011, Gapoktan telah merealisasikan kegiatan simpan pinjam meskipun belum secara formal. Hasilnya, kelompok simpan pinjam yang masih beranggotakan 15 orang berhasil membuat kesepakatan dan mengumpulkan simpanan yang dilakukan setiap selapan-an (35 hari) sekali. Pada bulan Oktober ini terkumpul dana simpanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sementara itu, di Desa Sendangmulyo juga sudah dapat menambah aktivitas, yaitu pengaktifan LMDH, penyantunan penyandang masalah sosial, dan pembuatan criping dari gadung.

Dari hasil evaluasi proses dan akhir yang dilaksanakan *community worker* bersama, kelompok dapat memahami faktor pendorong dan penghambat selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini.

1. Faktor Pendorong: (a) Solidaritas yang tinggi antar warga merupakan modal utama untuk melakukan sesuatu guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat; (b) Tradisi gotong royong dan kekeluargaan

yang masih kental, termasuk kesediaan warga untuk melakukan pengumpulan dana; (c) Modal fisik yang cukup baik memperlancar kegiatan-kegiatan warga.

b. Hambatan: (a) Keikutsertaan anggota kelompok kurang maksimal karena bulan puasa dan lebaran 1432 H. Seperti umumnya masyarakat, pada bulan puasa agak malas beraktivitas, dan bulan berikutnya yakni bulan September, kelompok disibukkan perayaan lebaran 1432 H; (b) Ketersediaan bahan pokok pembuatan criping khususnya pisang, cukup mahal, hal ini berpengaruh terhadap kelancaran pembuatan produk criping; (c) Tingkat pendidikan kelompok yang relatif rendah berpengaruh terhadap tingkat penerimaan substansi materi dan motivasi diri, sehingga sebagian peserta yang belum memahami pentingnya pemanfaatan sumberdaya lokal tidak aktif mengikuti kegiatan kelompok; (d) Kurangnya kemauan kelompok yang *notabene* berasal dari unsur pemuka masyarakat dalam melaksanakan kegiatan secara kelompok dengan alasan kesibukan; (e) Petugas pendamping yang karena alasan kesibukan tidak maksimal dalam melakukan kegiatan pendampingan.

Lembaga lokal di kedua desa tersebut umumnya sudah melaksanakan kegiatan. Seperti dikemukakan, pada evaluasi akhir yang dilakukan pada bulan Oktober 2011, Gapoktan telah merealisasikan kegiatan simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam yang semula beranggotakan 15 orang (anggota kelompok) menjadi 19 orang, dan telah membuat kesepakatan serta pengumpulan dana, yang dilakukan setiap *selapan-an* (35 hari) sekali, hingga bulan Oktober 2011 terkumpul Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan langsung dipinjamkan kepada anggota. Sementara itu, di Desa Sendangmulyo juga sudah dapat melaksanakan aktivitas, yaitu pengaktifan LMDH, penyantunan penyandang

masalah sosial, dan pembuatan criping dari gadung.

Saran-saran yang diajukan oleh kelompok dan pendamping menjadi masukan dan perlu ditindaklanjuti, antara lain: (1) Pembinaan secara berkelanjutan dari pihak petugas (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah); (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) perlu terus memotivasi kelompok untuk tetap melanjutkan kegiatan

yang telah dilaksanakan; (3) Perlu bantuan stimulan finansial dari pihak lain yang peduli dengan kondisi masyarakat sekitar hutan; (4) Adanya program/kegiatan dari dinas terkait (Pusat, Daerah) untuk mendukung program yang telah disusun dan dilaksanakan masyarakat; (5) Aparat desa untuk terus ikut memotivasi kegiatan masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut diringkas dan dapat dicermati pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Evaluasi:

Tahapan	Kegiatan	Hasil
Evaluasi	Pelaksanaan kegiatan evaluasi proses dan akhir (<i>Community worker</i> ; Kelompok)	Kegiatan yang dilaksanakan: - Simpan pinjam (Koperasi) meskipun belum secara formal; - Pelayanan kesejahteraan sosial, - Kegiatan pengolahan sumberdaya lokal (criping, kompos). - Pengaktifan lembaga lokal.

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat Desa Mlatirejo yang homogen dari sisi etnis (Jawa) dan agama (Islam), mempunyai hubungan kekerabatan yang harmonis, agraris dari sisi mata pencarian dan berbatasan langsung dengan hutan Jati itu melalui kelompok (Gapoktan) pada kegiatan *action research* ini mereka berperan secara aktif, sehingga telah dapat dilakukan kegiatan pengolahan sumberdaya lokal berupa pembuatan *criping* dari pisang, ubi jalar, dan talas. Kegiatan yang telah direncanakan namun belum dilakukannya adalah pembuatan kompos dari kotoran ternak sapi/kambing. Kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilakukan antara lain memberikan santunan kepada anak-anak yatim/piatu, melakukan pertemuan kelompok per-*selapanan* (35 hari) dan pencatatan/ pengadministrasian kegiatan yang dilakukan termasuk keuangan, dan sekaligus penghimpunan dana, dari, oleh, dan untuk anggota (masyarakat).

Sementara itu pada masyarakat Desa Sendangmulyo yang serupa karakteristiknya dengan masyarakat Desa Mlatirejo, melalui kelompok (LMDH) juga telah dapat melakukan aksi sosial dalam bentuk mengantar warga yang *stress* ke RSJ Solo, melakukan pencatatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk tertib administrasi keuangan, serta pengolahan sumberdaya lokal yaitu pembuatan criping dari gadung dan buah pisang. Namun demikian, pada LMDH, karena motor penggeraknya dapat dikatakan bertumpu pada figur seorang perangkat desa yakni sekretaris desa, ketika sang figur tumpuan tersebut tidak aktif pada kegiatan LMDH, maka serta merta kegiatan LMDH juga terhenti. Seperti Gapoktan, yang belum dapat dilakukan oleh LMDH adalah pembuatan kompos dari ternak sapi/kambing yang sebenarnya telah mendapatkan pesanan dari calon pengguna sekitar dua ton-an tetapi masih menunggu musim hujan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut kepada instansi teknis pusat dan daerah disarankan hal-hal berikut: (1) Setiap pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaknya melibatkan masyarakat dalam semua tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Disamping itu, program/kegiatan harus berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal. Harapannya, lembaga lokal kelak berperan menjaga kesinambungan program/kegiatan dan bahkan mengembangkan program serta tidak terjadi ketergantungan masyarakat terhadap (bantuan) pihak luar; (2) Kementerian Sosial, melalui unit-unit teknis terkaitnya dapat saling bersinergi. Misalnya: Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan dapat memokuskan programnya pada peningkatan fungsi dan peran lembaga lokal melalui peningkatan kompetensi pengelola, pemantapan manajemen organisasi, pemantapan *"fund rising"* untuk usaha-usaha kesejahteraan sosial; Melalui lembaga lokal tersebut juga dimungkinkan dilaksanakannya program/kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dari Direktorat Jaminan Sosial; Melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dapat dilakukan program pemberdayaan fakir miskin; Program/kegiatan penyuluhan sosial juga sangat penting dilakukan sebelum pelbagai program/kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan mengingat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sasaran Kementerian Sosial masih rendah; (c) Pemerintah Daerah (Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah) melalui dinas terkaitnya dimungkinkan menjadikan hasil *action research* ini sekurangnya sebagai informasi bagi penyusunan program dan menyinergikan dengan program pusat dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: LPFE-UI.
- Adi, I.R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (Dari Pemikiran menuju Penerapan)*, Jakarta: FISIP-UI PRESS.
- Astana, S. (2003). *Kajian Pencegahan illegal logging*, Badan Litbang Kehutanan.
- Cohen & Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*, New York: Cornell University.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Creswell, J.W. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: KIK Press (Terjemahan).
- <http://www.menlh.go.id>, Keputusan Menteri Kehutanan, No. 31 Tahun 2001, Tentang: Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Diakses 26 Februari 2012 Jam. 14.46
- Kementerian Sosial R.I. *Rencana Strategis 2010 - 2014*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kompas, 19 Mei 2005. *Rakyat Miskin Dimanfaatkan Cukong untuk Membabat Hutan*.
- Kompas, 15 Juli 2005. *Kemiskinan Kita*.
- Kompas, 4 Agustus 2005. *Kemiskinan Merupakan Salah satu Ancaman Abad Ke 21*.

- Muchtar, Hanifah A., Sutaat, Padi, T.A & Sugiyanto (2010). *Penelitian Pemberdayaan Masyarakat daerah Tertinggal: Identifikasi Kebutuhan, Sumberdaya, Permasalahan di Desa Jambu & Desa Engkangin serta Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo*. Jakarta: P3KS Press.
- Media Indonesia, 19 Mei 2005. *Setiap Tahun Indonesia Kehilangan Dua Juta Hektare Hutan*.
- Stringer, E.T. (1996). *Action Reseach: A Handbook For Practitioners*, California: Sage Publication, Inc.

